

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya),
Rineka Cipta Bandung 1987
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co. Jakarta
1992
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan
Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung 1987
- Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008
- CST Kansil, Praktek Hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,
Erlangga, Jakarta, 1983
- _____, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta 2002
- Hasbullah Thabrany, Makalah : Rumah Sakit Publik berbentuk Badan Layanan
Umum, Bentuk paling Pas dalam Koridor Hukum Saat Ini, disampaikan
dalam Seminar Sehari “Kontroversi Pengelolaan dan Bentuk Kelembagaan
Rumah Sakit Pemerintah” di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2005
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000

I.C. van der Vlies, Handboek Wetgeving, alih bahasa Linus Doludjawa, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta

Jazim Hamidi, Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik), Jurnal Hukum No.3 Vol. 18 Juli 2011

Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta 2006

_____, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta 2011

_____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Kushandajani, Artikel: Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

Ni'matul Huda, Problematikan Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2010

Ni'matul Huda dan Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusamedia, Bandung 2011

Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta 2007

Muhammad Djafat Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2011

- Muhammad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007
- Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008
- Panduan Fasilitasi Seri Manajemen Pelayanan Publik : Badan Layanan Umum Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
- Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Gadjahmada University Press, Yogyakarta 1993
- Priyo Hari Adi, Jurnal Kritis: Dampak Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Fiskal. Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung 1982
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008
- Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2006
- Ridwan Khairandy dan rekan, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999
- Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung 1998
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta 2003

_____, Hukum Administrasi di Daerah, UII Press, Yogyakarta 2009

Satjipto Rahardjo, Imu Hukum, Alumni, Bandung, 1996

S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, UII Press, Yogyakarta 2011

Solly Lubis, Landasan dan Teknis Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta 1981

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2006

Wahyudi Kumorotomo dalam makalah berjudul Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Menwujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik yang disampaikan pada Seminar Persadi Hotel Ibis Pekanbaru tanggal 16 Juni 2007

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta 2010

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur Nomor 6/KEP/2012 tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga